BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Islam sebagai sebuah agama yang sesuai dengan kodrat manusia, telah memberikan tuntutan bagi manusia dalam menjalankan segenap aktifitas kehidupan manusia dalam mencapai kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Islam telah pula memberikan bimbingan dan tuntunan bagi manusia dalam berhubungan dengan sang khaliq, dan hubungan manusia dengan manusia.

Perkawinan merupakan kebutuhan kodrat manusia, setiap manusia diciptakan oleh sang khaliq untuk memiliki hasrat dan keinginan untuk melangsungkan perkawinan. Sebagaimana agama yang sesuai dengan kodrat manusia, agama Islam telah memberikan aturan dan tatanan didalam menjaga nilai-nilai moral manusia dan kemuliaan manusia disisi Allah SWT dan didalam lingkungan pergaulan antar manusia. Manusia adalah makhluk yang lebih mulia dan diutamakan Allah dibandingkan makhluk lainnya. Allah telah menciptakan aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Allah tidak membiarkan manusia berbuat semaunya, Allah telah memberikan batas dengan aturan-aturan-Nya, yaitu dengan syari`at yang terdapat dalam al Qur`an dan sunnah rasul-Nya dengan hukum-hukum perkawinan¹.

¹ H.S.A. Al Hamdani. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hal. 2

Hubungan perkawinan hendaklah diertatkan dengan sekokoh-kokohnya dengan cara dan jalan apapun². Pada dasarnya perkawinan itu dilaksanakan untuk selamanya sampai matinya salah seorang suami istri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki agama Islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir sebagai usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan begitu merupakan suatu jalan keluar yang baik³.

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam suatu negara, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan suami istri tersebut⁴. Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena berbagai hal, antara lain karena terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya atau karena terjadinya perceraian diantara keduanya atau karena sebab-sebab yang lain⁵.

Dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan Pasal 38 perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas

² Ibnu mas'ud dan zainal Abidin."Fiqh Mahzab Syafi'i, buku 2 (muamalat , jinayat, jinayah)" (Bandung. Pustaka Setia. 2000), hal. 354

³ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan UU*, (Jakarta: Kencana. 2006), hal. 190

⁴ Abdul Manan. "Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. (Jakarta: Kencana. 2006), hal. 443

⁵M.A Tihami,dan Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat ...* hal. 229

keputusan pengadilan, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, lebih rinci lagi disebutkan ; Pasal 116, huruf a perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut: Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Khusus tentang perceraian dengan alasan zina pemerintah telah mengaturnya dalam UU No. 7 tahun 1989 tentang PA dalam pasal 87 (1) dan 88 (1). Pasal 87 Apabila permohonan atau gugatan cerai diajukan atas alasan salah satu pihak melakukan zina, sedangkan pemohon atau penggugat tidak dapat melengkapi bukti-bukti dan termohon atau tergugat menyanggah alasan tersebut, dan Hakim berpendapat bahwa permohonan atau gugatan itu bukan tiada pembuktian sama sekali serta upaya peneguhan alat bukti tidak mungkin lagi diperoleh baik dari pemohon atau penggugat maupun dari termohon atau tergugat, maka Hakim karena jabatannya dapat menyuruh pemohon atau penggugat untuk bersumpah. Pasal 88 Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh suami, maka penyelesaiannya dapat dilaksanakan dengan cara *li'an*.

Jadi apabila suami mengangkat sumpah terhadap tuduhannya kepada istrinya maka perceraian tersebut dilaksanakan dengan cara *li'an*. Dalam persoalan *li'an*, suami menduga kuat berdasarkan apa yang dilihatnya, bahwa istri telah berbuat zina, namun tidak ada empat orang saksi yang diajukannya, maka dalam al Qur'an ditentukan bahwa suami wajib bersumpah empat kali dengan menyebut nama Allah, dan sumpah yang kelima laknat Allah atas dirinya jika ia termasuk orang-orang yang berdusta. Dalam hukum islam *li'an* dibagi menjadi 2 macam : 1) Suami menuduh istrinya berbuat zina tetapi ia tidak

memiliki 4 saksi laki-laki yang dapat menguatkan kebenarannya tuduhannya tersebut. 2) Suami tidak mengakui kehamilan istrinya sebagai benihnya⁶.

Dalam hal ini boleh bermula`*anah* jika ia merasa belum pernah mencampuri istrinya tapi secara nyata ia hamil, atau ia merasa mencampurinya baru setengah tahun yang lalu atau juga lewat setahun, sedangkan umur kandungannya tidak sesuai<sup>7</sup>. Apabila suami mengingkari anak yang dikandung istrinya dengan mengucapkan *li`an*, maka *nasab* anak itu tidak mengikuti *nasab* ayahnya dan tidak berhak menerima nafkah dari ayahnya. Anak dan ayah tersebut tidak saling mewarisi, nasab anak itu menuruti nasab ibunya, ibunya mewarisi tinggalan anaknya dan anaknya mewarisi harta ibunya⁸.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 125 : *Li`an* menyebabkan putusny perkawinan antara suami istri untuk selamanya. Pasal 162 akibat *li`an* adalah : “Bilamana *li`an* terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung *dinasabkan* kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah.”

Berdasarkan penjelasan tersebut maka status anak kedua suami istri itu hanya akan *dinasabkan* kepada ibunya saja. Begitu pula berkenaan dengan status anak yang hanya menjadi ahli waris dari ibunya saja karena ayahnya telah mengingkari sebagai anaknya, dan diantara keduanya (suami istri) tidak dapat kembali lagi selamanya.

⁶ Sayid, Sabiq. *Fiqh Sunah, Jilid 3*. Darul fath. 2004. terj. Nor Hasanudin. (Jakarta. Pena. 2006). hal. 21

⁷ Abdul Manan. “*Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. (Jakarta: Kencana. 2006) hal. 461

⁸ H.S.A Al Hamdani. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. (Jakarta: Pustaka Amani, 2002) hal. 297

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul **“AKIBAT HUKUM SUMPAAH *LI’AN* MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA”**

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pembuktian kasus perceraian karena *li'an* ?
2. Bagaimana akibat hukum sumpah *li'an* menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Pada umumnya suatu penelitian mempunyai tujuan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui dan memahami status anak terhadap mantan suami dari istri yang dicerai *li'an* sekaligus apakah *li'an* termasuk *talak* atau *fasakh* dan memahami dasar keharaman untuk menikah kembali selamalamanya antara suami istri yang telah ber*li'an*.

1.4. Kerangka Teori dan Konseptual

1.4.1. Kerangka Teori

Teori yang digunakan adalah teori kebenaran koherensi menurut Plato. Teori kebenaran koherensi ini biasa disebut juga dengan teori konsistensi. Pengertian dari teori kebenaran koherensi ini adalah teori kebenaran yang mendasarkan suatu kebenaran pada adanya kesesuaian suatu pernyataan dengan pernyataan-pernyataan lainnya yang sudah lebih dahulu diketahui, diterima dan diakui kebenarannya. Sederhanya dari teori ini adalah pernyataan dianggap benar apabila bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap benar.

1.4.2. Konseptual

1. Dampak Hukum

Dampak hukum yang penulis maksud disini adalah segala akibat yang timbul dari adanya sumpah *li`an*.

a. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan merupakan bagian dari agama Islam. Hukum⁹ Islam merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan dari *al-fikih al islami*. Dalam al Qur`an dan sunnah, istilah *al hukm al-islam* tidak ditemukan. Namun yang digunakan adalah kata syari`at Islam, yang kemudian dalam penjabarannya disebut dengan istilah fiqh¹⁰.

Fiqh merupakan himpunan norma atau aturan yang mengatur tingkah laku, baik berasal langsung dari al-Qur`an dan sunnah nabi saw, maupun hasil dari ijtihad para ahli hukum Islam¹¹.

b. Hukum Positif di Indonesia

Hukum positif di Indonesia adalah hukum yang berlaku pada waktu ini di indonesia yang dibentuk oleh badan-badan kenegaraan yang diberi wewenang untuk membentuknya. Hukum positif yang penulis maksud disini adalah UU Perkawinan No.1 Tahun 1974, UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan Kompilasi Hukum Islam.

⁹ Sulaikin Lubis, Wismar Ain dan Gemala Dewi. *Hukum Acara Perdata Indonesia* hal. 13

¹⁰ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat ...* hal. 5

¹¹ Mustofa dan Abdul Hamid. *Hukum Islam Kontemporer*. (Jakarta. Sinar Grafika. 2009)

2. Sumpah *Li'an*

Sumpah *Li'an* adalah sumpah seorang suami apabila ia menuduh istrinya berbuat zina. Sumpah itu diucapkan empat kali bahwa tuduhannya itu benar dan pada sumpah yang ke lima itu ia meminta kutukan kepada Allah jika ia berdusta. Pihak istri juga bersumpah empat kali bahwa dirinya tidak berbuat sebagaimana yang dituduhkan suaminya, pada sumpah yang kelima ia bersedia menerima kutukan Allah jika tuduhan suaminya ternyata benar. Pengertian *Li'an* dalam istilah fiqh ialah kesaksian atau sumpah yang diucapkan seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina.

1.5. Metode penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu: mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

1.5.2. Pendekatan Masalah

Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini, penulis berusaha mengkajinya melalui metode hukum normatif, maksudnya adalah menguraikan dan menganalisa masalah berdasarkan perundang-undangan, serta pandangan atau pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Pendekatan yang dipakai ialah conceptual approach.

1.5.3. Sumber Hukum

Sumber Hukum dibagi menjadi 2 yakni :

1. Sumber Primer

Bahan hukum dalam penyusunan penelitian ini yaitu berupa bahan Hukum primer yang didapat dari kitab-kitab fiqh (*Al Um, Fiqh Sunah, Kifayatul Akhyar*), UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, UU No. 7 tahun 1989 jo UU No.3 thn 2006 tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam

2. Sumber Sekunder

Bahan hukum sekundernya didapat dari buku, artikel yang sesuai dengan topik penelitian dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan sumpah *li'an*.

1.5.4. Prosedur Pengumpulan dan Perolehan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan dan perolehan bahan hukum yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian ini adalah dengan melakukan studi kepustakaan dengan menggunakan buku-buku dan kumpulan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah *sumpah li'an*. Setelah disusun secara sistimatis sehingga dapat sebagai pendukung didalam pembebasan masalah.

1.5.5. Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum yang terkumpul selanjutnya dianalisa dengan menggunakan analisa konseptual, dimana bahan hukum diseleksi terhadap bahan hukum yang relevan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini, selanjutnya bahan hukum tersebut diolah sesuai dengan keperluan yaitu dengan mengklasifikasikannya berdasarkan kelompok bahasan masing-masing untuk dianalisis.

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, dibagi ke dalam lima bab agar mudah mengklarifikasikan pembahasan sesuai dengan perumusan permasalahannya yaitu :

BAB I : Bab pendahuluan yang memuat latar Belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan umum perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, pengertian perkawinan dalam hukum Islam dan hukum positif di indonesia, dasar hukum perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif di indonesia , tujuan perkawinan, hikmah perkawinan, rukun atau syarat sahnya perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif di indonesia serta perbandingan rukun atau syarat sahnya perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif di indonesia, juga membahas mengenai larangan

perkawinan menurut hukum Islam , KHI serta menurut KUH Per.

BAB III : Tinjauan umum terhadap perceraian dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, pengertian perceraian dalam hukum Islam, pengertian perceraian dalam hukum positif di Indonesia , alasan perceraian dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, pengertian *li`an* menurut Al-qur`an dan KHI, pengertian *li`an* menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, pengertian talak menurut Al-qur`an dan KHI, proses perceraian di pengadilan agama.

BAB IV : Membahas tentang pembuktian kasus perceraian karena *li`an*, akibat hukum sumpah *li`an* menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, status atau kedudukan anak yang dilahirkan berdasarkan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

BAB V : Merupakan Bab terakhir yang merupakan bab penutup yang menyimpulkan dari rangkaian hasil penulisan dan saran yang disampaikan terkait dengan hasil yang diperoleh dalam pembahasan pada bab-bab sebelumnya.